

Peraturan Gubernur Banten No 2019
Tentang
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten dan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2017-2022

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Ket																									
1.	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	<p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p> <p>IKM Unit Pelayanan x 25</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval {NI}</th> <th>Nilai Interval Konversi (NIK)</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 2,5996</td> <td>25,00 – 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 – 3,064</td> <td>65,00 – 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 – 3,532</td> <td>76,61 – 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 – 4,00</td> <td>88,31 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval {NI}	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik	Sekretaris Daerah
Nilai Persepsi	Nilai Interval {NI}	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																										
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																										
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																										
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik																										
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																										
2	Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah	Capaian kinerja infrastruktur daerah (%)	Ketercapaian Kinerja Infrastruktur Daerah	$= \frac{\text{Kinerja Infrastruktur Daerah Tahun } (n)}{\text{Target Kinerja Tahun } (n)} \times 100 \%$																										
3.	Terwujudnya Akses dan	Indeks Pembangunan	adalah pengukuran perbandingan																											

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Ket
	Kualitas Pendidikan dan Sosial Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing	Manusia (%)	dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Umur panjang dan hidup sehat 2. Pengetahuan 3. Standar hidup layak 	$IPM = \{X1 + X2 + X3\}/3$ <p>X1 = Indeks Angka Harapan Hidup X2 = 2/3 (Indeks Melek Huruf) + 1/3 (Indeks Rata-rata Lama Sekolah) X3 = Indeks Konsumsi perkapita yang disesuaikan</p> <p>Atau $IPM = \sqrt{\text{Indeks kesehatan} \times \text{Indeks Pendidikan} \times \text{Indeks Pengeluaran} \times 100}$</p> <p>Sumber dan hasil perhitungan : BPS Provinsi Banten</p>	
4.		Index Gini / Menurunnya Ketimpangan Pendapatan (%)	Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana: Pi: persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi: persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: $G < 0,3$ = ketimpangan rendah $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi</p>	
5.		Kemiskinan (%)	Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan	$GK = GKM + GKNM$	

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Ket
			makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan	GK = Garis Kemiskinan GKM = Garis Kemiskinan Makanan GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan Sumber dan hasil perhitungan : BPS Provinsi Banten	
6.		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	$\frac{i \text{ pengangguran}}{\text{angkatan kerja}}$ Sumber dan hasil perhitungan : BPS Provinsi Banten	
7.	Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup (%)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	
8.	Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan Berbasis Potensi Ekonomi Lokal	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.	Rumus Perhitungan $R(t-1, t) = (PDBt - PDBt-1)/PDBt-1 \times 100\%$ Keterangan: R = tingkat pertumbuhan ekonomi dalam satuan persentase (%) PDBt = Produk Domestik Bruto (pendapatan nasional riil) pada tahun t PDBt-1 = Produk Domestik Bruto (pendapatan nasional riil) pada tahun sebelumnya Sumber dan hasil perhitungan : BPS Provinsi Banten	
9.		Tingkat Inflasi (%)	Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-	Cara menghitung Tingkat Inflasi: Menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau consumer price index. Cara ini mengukur harga rata-rata dari barang yang dibeli oleh konsumen. Deflator PDB yaitu dengan cara menghitung besarnya perubahan harga dari	

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Ket																												
			menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga.	semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi dan jasa. Rumus penghitungan: (IHK yang sekarang – IHK waktu yang lalu) / IHK Sekarang x 100 Sumber dan hasil perhitungan : BPS Provinsi Banten																													
	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Asisten Daerah (esselon II)																															
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Pemda (Nilai)	Hasil Penilaian SAKIP Pemda Provinsi Banten oleh KemenPAN RB	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">KOMPONEN</th> <th>BOBOT</th> <th>SUB KOMPONEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>35</td> <td>Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>20</td> <td>Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15</td> <td>Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>10</td> <td>Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pencapaian Kinerja</td> <td>20</td> <td>Kinerja Yang Dilaporkan, Output Dan Outcome Dan Kinerja Lainnya</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN	1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja	2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran	3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja	4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi	5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, Output Dan Outcome Dan Kinerja Lainnya	TOTAL		100		Asisten Administrasi Umum
KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN																														
1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja																														
2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran																														
3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja																														
4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi																														
5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, Output Dan Outcome Dan Kinerja Lainnya																														
TOTAL		100																															
2.		Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (%)	Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kategori</th> <th>Nilai/Angka</th> <th>Interprestasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AA</td> <td>>90 -100</td> <td>Istimewa</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>A</td> <td>>80 - 90</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BB</td> <td>>70 - 80</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>B</td> <td>>60 - 70</td> <td>Baik, perlu sedikit perbaikan</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CC</td> <td>>50 - 60</td> <td>Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>C</td> <td>>30 - 50</td> <td>Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kategori	Nilai/Angka	Interprestasi	1	AA	>90 -100	Istimewa	2	A	>80 - 90	Memuaskan	3	BB	>70 - 80	Sangat Baik	4	B	>60 - 70	Baik, perlu sedikit perbaikan	5	CC	>50 - 60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar	6	C	>30 - 50	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar	
No	Kategori	Nilai/Angka	Interprestasi																														
1	AA	>90 -100	Istimewa																														
2	A	>80 - 90	Memuaskan																														
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik																														
4	B	>60 - 70	Baik, perlu sedikit perbaikan																														
5	CC	>50 - 60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar																														
6	C	>30 - 50	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar																														

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan				Ket	
				7	D	>0 - 30	Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar		
3.		Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD (Nilai)	Hasil Penilaian SAKIP seluruh OPD oleh Inspektorat						
				KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN		
				1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja		
				2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran		
				3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja		
				4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi		
				5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, Output Dan Outcome Dan Kinerja Lainnya		
	TOTAL	100							
4.	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah	Persentase Pembangunan dan Penanganan Infrastruktur (%)	Capaian Pembangunan dan penanganan infrastruktur	$= \frac{\text{Pembangunan dan penanganan infrastruktur tahun}(n)}{\text{Target tahun}(n)} \times 100\%$				Asisten Pembangunan dan Perekonomian	
5.	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan (%)	Laju Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Laju Pertumbuhan ekonomi sektor unggulan adalah kondisi perekonomian pada sektor yang menjadi unggulan di Provinsi Banten yaitu Sektor pertanian	<p>LPE Sektor Unggulan =</p> $\frac{\text{LPE pertanian} + \text{LPE industri} + \text{LPE Perdagangan} + \text{LPE Pariwisata}}{4}$ <p>Keterangan: LPE Sektor unggulan adalah rata-rata hasil penjumlahan dari LPE sektor pertanian, sektor industri, sektor perdagangan dan sektor pariwisata</p>					

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Ket
			termasuk kelautan dan perikanan, sektor industri, sektor perdagangan dan sektor Pariwisata		
6.	Meningkatnya Layanan Keuangan Pada Masyarakat	Indeks Keuangan Inklusif (Nilai)	Indeks Keuangan Inklusif (IKI) adalah salah satu cara alternatif untuk pengukuran keuangan inklusif yang menggunakan indeks multidimensional berdasarkan data makroekonomi, terutama pada jangkauan layanan sektor perbankan	$IKI = \frac{p + a + u}{3}$ IKI = Indeks Keuangan Inklusif p = penetrasi perbankan a = kemudahan penggunaan u = penggunaan layanan keuangan	
7.	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Peringkat Daya Saing Provinsi dibandingkan Provinsi Lain di Indonesia (Nilai)	Daya Saing ekonomi yang komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan Provinsi Banten untuk mencapai pembangunan ekonomi yang tinggi dan inklusif dalam kurun waktu yang cukup panjang	$\text{Nilai Standar} = \frac{\text{Nilai Asli} - \text{Nilai Rerata}}{\text{Deviasi Standar}}$ Keterangan: 0 (nol) = sama dengan rerata nasional - (negatif) = di bawah rerata nasional + (positif) = di atas rerata nasional Sumber dan hasil perhitungan: Asia Competitiveness Institute	
8.	Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon	Emisi Rumah Kaca (%)	Gas rumah kaca adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca . Gas-gas tersebut sebenarnya muncul secara alami di lingkungan, tetapi dapat juga timbul akibat aktivitas manusia. Gas rumah kaca yang paling banyak adalah uap air yang mencapai atmosfer akibat penguapan air dari laut, danau dan sungai. Emisi Rumah Kaca adalah	$\text{Emisi} = \text{Data Aktivitas} \times \text{Faktor Emisi}$ Data Aktivitas: Data kegiatan dari semua sektor yang dapat menimbulkan emisi Faktor Emisi : Emisi yang dihasilkan dari sektor industri, pertanian, kehutanan, energi, transportasi, dan persampahan (limbah).	

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Ket
			kerusakan/dampak perubahan iklim dari Gas Rumah Kaca yang berpengaruh besar pada kehidupan manusia.		
9.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	Harapan lama sekolah (Satuan: Tahun)	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.	Adapun rumus untuk penghitungan HLS adalah sebagai berikut: $HLS_7 = \sum_{i=7}^n \frac{E_i}{P_i}$ Dimana: HLS = Harapan Lama Sekolah E_i = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah P_i = Jumlah seluruh penduduk usia i i = Usia (7, 8, ..., n)	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
10.	Rata rata lama sekolah (Satuan: Tahun)	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.		
11.	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Daya Beli (%)	Daya beli masyarakat adalah kemampuan masyarakat sebagai konsumen untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. daya beli masyarakat ini ditandai dengan meningkat ataupun menurun, dimana daya beli meningkat jika lebih tinggi dibanding periode lalu sedangkan daya beli menurun ditandai dengan lebih tingginya kemampuan beli masyarakat dari pada periode sebelumnya.	Daya Beli = $\frac{PKRT}{IHK}$ atau Daya Beli = $\frac{PDRB \text{ perkapita}}{IHK}$ Keterangan: PKRT= Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga PDRB= Produk Domestik Regional Bruto IHK = Indeks Harga Konsumen	
12.	Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja bagi Masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15	Indikator ini merupakan persentase dari jumlah angkatan kerja terhadap jumlah usia kerja	

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Ket
			tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi	$\frac{\text{jumlah angkatan kerja}}{\text{jumlah usia kerja}} \times 100$	
13.	Meningkatnya Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender)	Indeks pembangunan gender (IPG) (Nilai)	Indeks yang mengukur ukuran tingkat pencapaian tiga indikator utama pembangunan sumber daya manusia dibidang kesehatan, pendidikan dan pendapatan per kapita/pengeluaran dengan memperhitungkan ketimpangan jender (untuk mengetahui kesenjangan pembangunan antara laki – laki dan perempuan	$= \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ laki – laki}}$	
14.	Meningkatnya Pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup) (Jumlah)	Ibu yang meninggal pada masa kehamilan, bersalin dan nifas bukan karena kecelakaan atau sakit di wilayah tertentu selama satu tahun	$= \frac{\text{ibu yang meninggal krn hamil, bersalin, nifas di suatu wilayahttt selama satu}}{\text{kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama}}$	
15.		Angka Kematian Bayi (Per 1000 kelahiran hidup) (Jumlah)	Angka kematian bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi di bawah satu tahun untuk setiap 1.000 kelahiran hidup.	$= \frac{\text{bayi yang meninggal yang berumur kurang 1 thn}}{\text{kelahiran hidup}} \times 1.000$	